

**MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PILAR KETAHANAN NASIONAL
: STUDI KONSEPTUAL DAN EMPIRIS**

Septi Permatasari¹, Lilis Karyawati², Nur Aini Farida³
^{1,2,3} Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam,

Universitas Singaperbangsa Karawang

2210631110189@student.unsika.ac.id¹, lilis.karyawati@fai.unsika.ac.id²,
nfarida@fai.unsika.ac.id³

ABSTRACT

Religious moderation is a strategic approach to maintaining social harmony and strengthening national resilience amidst Indonesia's diversity. This article examines the concept of religious moderation and its implementation within the context of national resilience through a literature study of various scholarly articles. The findings indicate that religious moderation plays a significant role in mitigating potential conflicts, preventing radicalism, and strengthening national identity. Effective implementation of religious moderation requires synergy among the government, religious leaders, and civil society. This article offers theoretical and practical contributions in supporting national policies based on the values of moderation.

Keywords: *Social Media, Religious Moderation, Younger Generation, Digital Literacy, Digital Dakwah*

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan nasional di tengah keberagaman Indonesia. Artikel ini mengkaji konsep moderasi beragama serta implementasinya dalam konteks ketahanan nasional melalui studi literatur dari berbagai artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan signifikan dalam meredam potensi konflik, mencegah radikalisme, dan memperkuat identitas nasional. Implementasi moderasi beragama yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendukung kebijakan kebangsaan berbasis nilai-nilai moderasi.

Kata Kunci: Media Sosial, Moderasi Beragama, Generasi Muda, Literasi Digital, Dakwah Digital

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang kaya, memukau dengan keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan agama yang menjadi ciri khasnya. Lebih dari sekadar statistik

demografi, keberagaman ini merupakan anugerah sekaligus fondasi identitas bangsa yang unik. Namun, di balik kekayaan ini, terbentang pula tantangan kompleks dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Sejak

awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari krusialnya toleransi dan persatuan sebagai pilar utama. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila, dengan sila-silanya yang mengedepankan persatuan dan keadilan sosial, serta semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi Tetap Satu", telah ditanamkan kuat sebagai landasan filosofis dan operasional dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sekadar slogan, melainkan pedoman hidup yang terus-menerus diupayakan untuk diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. (Muhammad Nikobul Lubab, 2025)

Namun, dalam dua dekade terakhir Indonesia menghadapi fenomena yang mengkhawatirkan: peningkatan intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial-politik yang semakin mengemuka. Gejala-gejala ini tidak hanya terbatas pada ranah wacana, melainkan telah termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi, ujaran kebencian, hingga tindakan kekerasan. Radikalisasi berbasis agama, khususnya, telah muncul sebagai ancaman nyata bagi

ketahanan nasional. Gerakan-gerakan ekstremis, yang seringkali bersembunyi di balik jubah agama, secara licik memanfaatkan narasi keagamaan untuk kepentingan politik atau kekuasaan semata. Mereka mengklaim kebenaran absolut, menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain, dan bahkan menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan demi mencapai tujuan destruktif mereka. Realitas ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat jika nilai-nilai dasar persatuan dan toleransi terkikis.

Di sinilah letak urgensi dan signifikansi moderasi beragama sebagai pendekatan strategis untuk membendung arus ekstremisme dan sekaligus membangun ketahanan nasional yang kokoh. Moderasi beragama tidak berarti melemahkan keyakinan atau menjadi abu-abu dalam beragama (Junaedi, 2019). Sebaliknya, ia mendorong pemahaman dan praktik keagamaan yang seimbang, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini berupaya mengembalikan esensi ajaran agama yang sebenarnya, yaitu membawa

kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dengan mengedepankan moderasi, masyarakat diharapkan mampu menolak narasi radikal, berpartisipasi aktif dalam dialog antaragama dan antarkelompok, serta memperkuat ikatan persaudaraan kebangsaan. Penelitian ini akan mengulas lebih dalam bagaimana moderasi beragama dapat menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat fondasi ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika global dan domestik yang terus berkembang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur sistematis, memungkinkan eksplorasi mendalam untuk memahami konsep dan implementasi moderasi beragama dalam konteks ketahanan nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah mendalam terhadap jurnal-jurnal ilmiah nasional yang relevan, di mana setiap artikel dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi argumen utama, temuan, dan rekomendasi terkait peran moderasi beragama dalam

memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tinjauan Konseptual

a. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah suatu sikap dan cara pandang dalam beragama yang fundamental, dicirikan oleh penolakan tegas terhadap segala bentuk ekstremisme, baik ekstrem kanan yang cenderung radikal dan puritan, maupun ekstrem kiri yang condong pada sekularisme atau liberalisme tanpa batas (Nurlaili, 2024). Ini bukan berarti meniadakan keyakinan atau menjadi tidak berprinsip, melainkan sebuah jalan tengah yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Konsep ini secara inheren mengedepankan keseimbangan kritis antara pemahaman teks-teks keagamaan (nash) dengan konteks zaman, sosial, dan budaya tempat agama itu diamalkan. Artinya, interpretasi agama tidak boleh kaku dan literal semata, tetapi harus adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan esensi ajarannya. Lebih jauh, moderasi beragama juga

menggarisbawahi pentingnya harmoni antara kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dengan penghormatan mendalam terhadap perbedaan keyakinan, tradisi, dan pandangan hidup orang lain. Ini berarti, kebebasan individu dalam menjalankan ajaran agamanya tidak boleh mengganggu hak-hak atau kebebasan kelompok lain, melainkan harus diiringi dengan sikap toleransi aktif dan penghargaan terhadap pluralitas.

Menurut (Pratam, 2024), moderasi beragama dapat dipahami sebagai bentuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang dijiwai dari perspektif Al-Qur'an. Ini menunjukkan sebuah sintesis yang kuat antara prinsip-prinsip kenegaraan Indonesia dengan ajaran agama Islam, yang mana Pancasila sendiri telah menjadi konsensus kebangsaan yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Artinya, nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam konteks Islam di Indonesia, tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip kebangsaan yang inklusif dan progresif. Justru, keduanya harus saling menguatkan dan berjalan seiring. Dalam pandangan ini, nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang

sangat ditekankan dalam ajaran Islam, seperti tercermin dalam konsep *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) atau perintah untuk berbuat adil bahkan kepada musuh, adalah selaras sepenuhnya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Misalnya, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sejalan dengan etika Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, dan sila Persatuan Indonesia sejalan dengan seruan untuk menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan menghindari perpecahan. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi jembatan yang menghubungkan dimensi spiritual dengan dimensi kebangsaan, menciptakan identitas Muslim Indonesia yang tidak hanya taat beragama tetapi juga setia kepada negara dan menjunjung tinggi keberagaman.

b. Moderasi Beragama dan Identitas Nasional

Moderasi beragama tidak hanya berperan dalam menjaga harmoni sosial, tetapi juga merupakan instrumen krusial dalam memperkuat identitas nasional. (Sulton, 2023) secara tegas menekankan bahwa moderasi

beragama adalah strategi kebudayaan dan politik yang esensial untuk membentengi dan memperkaya identitas nasional. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, di mana keberagaman adalah keniscayaan, sikap moderat dalam beragama menjadi fondasi bagi persatuan yang kokoh. Dengan mengadopsi sikap terbuka terhadap perbedaan, warga negara dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif, tanpa merasa terancam atau harus mengorbankan keyakinan agamanya. Ini berarti, seorang Muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dengan teguh, seorang Kristen dapat beribadah dengan khusyuk, dan penganut agama lain juga dapat mengekspresikan keyakinannya, semuanya dalam bingkai kebersamaan dan saling menghormati. Ruang yang aman bagi ekspresi keberagaman ini sangat penting dalam membangun rasa memiliki terhadap negara (*sense of belonging*) yang mendalam.

Rasa memiliki ini bukan sekadar identifikasi formal sebagai warga negara, melainkan sebuah ikatan emosional dan komitmen kuat terhadap kelangsungan dan kemajuan bangsa.

Ketika individu merasa bahwa negara menghargai identitas keagamaannya sekaligus menjamin kebebasan beribadah dan berekspresi, mereka cenderung akan lebih loyal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, jika ada kelompok yang merasa tereksklusi atau terancam karena perbedaan keyakinan, hal itu dapat memicu disintegrasi dan mengikis rasa kebangsaan. Moderasi beragama dengan demikian, menjadi kunci ketahanan nasional karena ia memupuk inklusivitas. Ia memungkinkan berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam latar belakang agama dan budaya, untuk bersatu di bawah payung identitas nasional yang sama yaitu Indonesia sembari tetap merayakan kekayaan perbedaan mereka. Ini adalah modal sosial yang tak ternilai, yang memungkinkan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar, dengan solidaritas dan persatuan yang tak tergoyahkan. Tanpa moderasi beragama, potensi konflik berbasis identitas akan selalu membayangi, dan hal ini secara fundamental akan

melemahkan sendi-sendi ketahanan nasional.

2. Studi Empiris

a. Moderasi Beragama di Era Digital

Peran sentral media sosial dalam menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama di era digital yang serba terkoneksi ini. Di satu sisi, media digital telah menjelma menjadi medan pertempuran ideologi yang kompleks, di mana berbagai narasi, baik yang positif maupun negatif, bersaing untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi pandangan publik. Potensinya untuk membawa pengaruh sangat besar, mengingat jangkauannya yang global dan kemampuannya untuk menjangkau audiens yang masif dalam waktu singkat. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kampanye digital yang digagas oleh tokoh agama yang kredibel, lembaga keagamaan yang moderat, serta organisasi masyarakat sipil yang pro-perdamaian, memiliki kapabilitas luar biasa untuk secara efektif menekan penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Pesan-pesan moderasi yang dikemas secara kreatif dan disebarluaskan melalui platform-platform ini mampu menawarkan kontra-narasi

yang mencerahkan dan meredam polarisasi yang kerap kali terjadi (Purbajati, 2020)

Kampanye-kampanye yang telah terbukti berhasil, seperti "Islam Ramah, Bukan Marah" atau "Beragama Tanpa Membenci", menunjukkan bagaimana pesan-pesan yang inklusif dan humanis dapat membangun narasi damai di tengah masyarakat yang beragam. Kampanye-kampanye ini seringkali menggunakan visual yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan *influencer* atau figur publik yang memiliki jangkauan luas untuk memperkuat resonansi pesan. Ini bukan hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya sistematis untuk membentuk kesadaran kolektif dan mendorong perubahan perilaku sosial. Namun, di balik potensi positif ini, terdapat tantangan utama yang harus dihadapi: algoritma media sosial. Algoritma ini, yang dirancang untuk memaksimalkan *engagement* pengguna, seringkali secara tidak sengaja memperkuat *echo chamber* dan *filter bubble*. Artinya, pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri,

sementara pandangan berbeda akan tersaring atau tidak muncul. Fenomena ini secara paradoks dapat mempercepat penyebaran radikalisme dan memperdalam polarisasi, karena individu semakin terisolasi dalam "gelembung" informasi mereka sendiri yang mengonfirmasi bias dan prasangka, sehingga rentan terhadap indoktrinasi ekstremis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih canggih dan kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan algoritmik ini demi mewujudkan ruang digital yang lebih sehat dan moderat.

b. Strategi Kontra-Radikalisasi melalui Moderasi

Penelitian yang dilakukan oleh secara empiris menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah strategi yang sangat efektif sebagai alat kontra-terorisme dan pencegahan radikalisasi. Temuan ini didasarkan pada studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya diidentifikasi sebagai wilayah rawan radikalisme. Dalam konteks ini, implementasi pendekatan dialog lintas agama (interfaith dialogue) terbukti menjadi instrumen vital. Dialog

semacam ini menciptakan ruang aman bagi penganut berbagai kepercayaan untuk saling memahami, menghilangkan prasangka, dan membangun jembatan persahabatan, sehingga secara signifikan mengurangi potensi konflik berbasis agama yang sering dieksploitasi oleh kelompok radikal. Selain itu, pelibatan aktif pemuda dalam program-program moderasi beragama juga memberikan dampak yang signifikan. Pemuda, yang seringkali menjadi target utama rekrutmen kelompok ekstremis, justru diberdayakan untuk menjadi agen perdamaian dan toleransi melalui berbagai kegiatan edukatif, diskusi, dan inisiatif komunitas. Melalui partisipasi mereka, pemahaman mengenai keberagaman dan pentingnya moderasi diperkuat, sehingga mampu menurunkan potensi rekrutmen ke dalam kelompok-kelompok radikal secara drastis.

Lebih lanjut, pendidikan berbasis moderasi, khususnya yang diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktik di lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah, menjadi kunci penting dalam membentuk pemahaman keagamaan

yang damai dan inklusif sejak dini. Lembaga-lembaga ini, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan pandangan generasi muda Muslim, berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebangsaan. Kurikulum yang berpusat pada penanaman nilai-nilai wasatiah (jalan tengah), penghormatan terhadap perbedaan, dan pemahaman kontekstual ajaran agama dapat membentengi siswa dari narasi ekstremis. Menyadari urgensi ini, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan berbagai modul dan pelatihan moderasi beragama secara masif. Program-program ini tidak hanya ditujukan bagi guru-guru di lembaga pendidikan agama, tetapi juga bagi para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi, membimbing umat, dan menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Inisiatif ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjadikan

moderasi beragama sebagai fondasi utama dalam upaya kontra-radikalisasi nasional.

c. Ketahanan Sosial Umat Beragama

Ketahanan sosial umat beragama merupakan pilar vital dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. (Jihad, 2019), dalam penelitian mereka yang berfokus pada masyarakat Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana komunitas lokal secara proaktif membangun ketahanan mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan intervensi eksternal, melainkan secara cerdas memanfaatkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah mengakar kuat serta menggalakkan dialog antaragama yang berkelanjutan. Kearifan lokal di sini merujuk pada nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang telah teruji dalam menjaga kohesi sosial, seperti musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, gotong royong dalam membantu sesama dan membangun komunitas, serta praktik saling jaga kampung atau saling melindungi antarwarga tanpa memandang latar belakang agama. Nilai-nilai ini berfungsi

sebagai "imunitas sosial" yang efektif, yang secara organik mencegah masuk dan menyebarnya ideologi radikal yang mengancam persatuan dan persaudaraan. Mereka membentuk benteng kultural yang kuat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Lebih dari itu, penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa moderasi beragama dan ketahanan sosial yang kuat tidak semata-mata dapat dibentuk melalui kebijakan formal yang digariskan oleh pemerintah dari atas (*top-down approach*). Sebaliknya, keberhasilan moderasi sangat bergantung pada fondasi yang dibangun melalui relasi sosial dan budaya lokal yang kokoh, yang bersifat *bottom-up*. Artinya, inisiatif dan praktik moderasi harus tumbuh dari akar rumput masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang erat antara tokoh agama dari berbagai keyakinan, tokoh adat yang memegang peran sentral dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal, serta pemerintah daerah yang berfungsi sebagai fasilitator dan regulator, menjadi kekuatan tersendiri yang luar biasa dalam menjaga stabilitas sosial. Sinergi ini menciptakan

ekosistem yang kondusif bagi pengembangan moderasi, di mana masing-masing pihak berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya. Tokoh agama memberikan bimbingan spiritual yang moderat, tokoh adat menjaga nilai-nilai luhur yang merekatkan komunitas, dan pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan serta dukungan praktis. Dengan demikian, ketahanan sosial umat beragama bukan hanya hasil dari intervensi, melainkan cerminan dari kemampuan masyarakat itu sendiri untuk beradaptasi, berinteraksi, dan memperkuat ikatan persaudaraan di tengah dinamika keberagaman.

d. Moderasi Beragama sebagai Instrumen Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional merupakan pilar fundamental bagi eksistensi dan keberlanjutan suatu negara, mencakup spektrum yang luas dari berbagai aspek krusial: ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan (Mohammady, 2017). Dalam kerangka yang komprehensif ini, moderasi beragama muncul sebagai instrumen strategis yang memiliki kontribusi langsung dan signifikan terhadap beberapa dimensi ketahanan

tersebut. Pertama, ketahanan ideologi menjadi sangat vital dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Moderasi beragama memastikan bahwa interpretasi dan praktik keagamaan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, mencegah munculnya ideologi ekstrem yang bertentangan dengan kemajemukan dan toleransi yang dijunjung tinggi. Kedua, ketahanan sosial terkait erat dengan kemampuan mengelola keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan mempromosikan sikap toleransi, saling menghormati, dan inklusivitas, moderasi beragama meredam potensi konflik antarumat beragama dan antarkelompok, sehingga tercipta harmoni sosial yang kokoh. Ketiga, ketahanan keamanan diperkuat melalui peran moderasi beragama dalam mencegah dan melawan terorisme serta berbagai bentuk konflik yang berakar pada penyalahgunaan agama. Dengan mengedukasi masyarakat tentang ajaran agama yang damai dan menolak kekerasan, moderasi beragama menjadi benteng ideologis yang mampu menangkal narasi radikal yang seringkali memicu kekerasan.

Lebih dari sekadar mencegah, moderasi beragama secara proaktif mampu menciptakan iklim kehidupan sosial yang damai, adil, dan berkelanjutan. Ketika masyarakat mengadopsi prinsip-prinsip moderasi, mereka cenderung lebih menghargai dialog, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara damai, alih-alih kekerasan atau pemaksaan. Negara-negara yang berhasil menerapkan moderasi dalam kehidupan keagamaannya cenderung menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi dan resiliensi yang kuat terhadap ancaman global yang terus berkembang. Misalnya, mereka lebih mampu menghadapi tantangan seperti konflik sektarian yang memecah belah komunitas, atau radikalisme transnasional yang meresahkan dunia. Dalam konteks Indonesia, di mana agama memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat, moderasi beragama bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Ia adalah fondasi yang memungkinkan Indonesia, dengan segala kekayaan keberagamannya, untuk tetap bersatu, berkembang, dan menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana harmoni

dapat tercipta di tengah perbedaan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan penguatan moderasi beragama adalah investasi jangka panjang untuk masa depan ketahanan nasional Indonesia.

e. Tantangan Implementasi

Modernisasi

Meskipun konsep moderasi beragama telah dikembangkan secara ekstensif pada tingkat teoritis, dan kebijakan pemerintah pun secara eksplisit mendukung serta mendorong implementasinya terlihat dari berbagai program dan regulasi realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dan upaya kolaboratif. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga struktural dan sosiokultural menurut (M. Amirul Mukhlisin Al Hariri, 2024):

a. Radikalisasi berbasis digital: Era digital, dengan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan platform yang tak terbatas untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi.

Namun, di sisi lain, ia juga menjadi medium yang sangat efektif bagi kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota, dan melakukan indoktrinasi. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, algoritma media sosial yang cenderung menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble*, serta anonimitas yang ditawarkan dunia maya, memungkinkan narasi ekstremis menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas, terutama di kalangan muda yang aktif di dunia digital. Konten provokatif, hoaks yang disamarkan sebagai kebenaran agama, dan ujaran kebencian mudah viral, menantang upaya moderasi.

b. Kurangnya literasi keagamaan moderat di kalangan anak muda: Generasi muda, sebagai agen perubahan masa depan, adalah target utama penyebaran ideologi. Sayangnya, banyak di antara mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang superfisial atau hanya terbatas pada satu perspektif, sehingga rentan terhadap tafsir agama yang kaku, tekstualis, atau

bahkan ekstrem. Kurangnya akses terhadap sumber-sumber literatur keagamaan yang moderat dan terpercaya, serta kurangnya bimbingan dari figur agama yang kompeten dan inklusif, membuat mereka mudah terpengaruh oleh narasi radikal yang seringkali mengklaim otoritas tunggal atas kebenaran. Kondisi ini diperparah dengan minat baca yang rendah di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan konten visual dan cepat saji.

- c. Politisasi agama dalam kontestasi demokrasi: Indonesia, sebagai negara demokrasi, secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum di berbagai tingkatan. Sayangnya, dalam kontestasi politik ini, agama seringkali dipolitisasi dan dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau memobilisasi dukungan. Penggunaan isu-isu keagamaan untuk menyerang lawan politik, penyebaran sentimen sektarian, dan pembentukan identitas politik berdasarkan afiliasi agama, dapat mengikis kohesi sosial dan memicu polarisasi yang berbahaya. Hal ini tidak hanya merusak nilai-nilai

demokrasi, tetapi juga mendistorsi ajaran agama itu sendiri dan menghambat upaya pembentukan masyarakat yang moderat dan harmonis.

f. Sinergi Aktor dan Kelembagaan

Keberhasilan implementasi moderasi beragama di Indonesia bukanlah tugas tunggal, melainkan sebuah agenda besar yang menuntut kolaborasi erat dan sinergi multi-aktor dari berbagai elemen bangsa. Moderasi tidak akan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan tanpa adanya kerja sama yang terstruktur dan terkoordinasi antarpihak-pihak yang memiliki peran dan kapasitas berbeda. Setiap aktor memiliki kontribusi unik yang saling melengkapi untuk mewujudkan moderasi sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menurut (Junaedi, 2019):

- a. Pemerintah (pembuat kebijakan): Pemerintah memegang peranan krusial sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Ini mencakup perumusan regulasi yang mendukung kebebasan beragama dan toleransi, alokasi anggaran untuk program-program moderasi, pembentukan kelembagaan yang

relevan, serta pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem hukum dan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan moderasi, termasuk menindak tegas segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Kebijakan yang inklusif dan non-diskriminatif

- b. Akademisi (pengembang wacana): Para akademisi, baik dari perguruan tinggi umum maupun keagamaan, memiliki peran vital dalam mengembangkan dan menyebarkan wacana moderasi beragama yang berbasis ilmu pengetahuan. Melalui penelitian ilmiah, publikasi jurnal, seminar, dan diskusi publik, mereka berkontribusi dalam merumuskan konsep-konsep moderasi yang relevan dengan konteks Indonesia, mengkritisi pandangan ekstrem, serta menawarkan solusi-solusi inovatif. Peran mereka juga mencakup penyusunan kurikulum pendidikan agama yang moderat dan pelatihan bagi calon pemimpin agama, sehingga memastikan penyebaran pemahaman yang kokoh dan berbasis riset.

c. Tokoh Agama (penyampai pesan moral): Tokoh agama, mulai dari ulama, pendeta, biksu, pandita, hingga pemuka adat, adalah garda terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan etika keagamaan yang moderat kepada umat. Mereka memiliki otoritas spiritual dan kedekatan emosional dengan jemaah, sehingga mampu memengaruhi cara beragama masyarakat. Melalui khotbah, ceramah, pengajian, pelayanan spiritual, dan teladan hidup, mereka dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan yang merupakan inti dari moderasi beragama. Peran mereka sangat penting dalam membimbing umat agar tidak terjebak dalam pemahaman agama yang sempit atau ekstrem.

- d. Masyarakat (pelaksana nilai): Pada akhirnya, masyarakat sipil adalah aktor sentral yang menjadi pelaksana dan penerima manfaat utama dari nilai-nilai moderasi. Melalui organisasi kemasyarakatan, komunitas lokal, lembaga pendidikan non-formal, hingga individu-individu,

masyarakat berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah agen yang menggerakkan inisiatif perdamaian, dialog antaragama, gotong royong lintas keyakinan, dan penolakan terhadap intoleransi di tingkat akar rumput. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam forum dialog maupun kegiatan sosial bersama, adalah indikator paling nyata dari keberhasilan implementasi moderasi.

Kolaborasi yang erat antara keempat aktor ini sangatlah penting agar moderasi beragama tidak hanya berhenti sebagai konsep yang tertulis di atas kertas atau sebagai retorika politis. Sebaliknya, sinergi ini akan memastikan bahwa moderasi beragama benar-benar terinternalisasi dan menjadi praktik hidup sehari-hari warga negara Indonesia. Pemerintah menyediakan payung kebijakan, akademisi memberikan landasan ilmiah, tokoh agama membimbing secara spiritual, dan masyarakat mengimplementasikan dalam praksis sosial, maka moderasi beragama akan menjadi kekuatan nyata yang menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat

ketahanan nasional di tengah segala tantangan global dan domestik.

D. Kesimpulan

Moderasi beragama memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, Indonesia membutuhkan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan keagamaan dan kehidupan sosial yang harmonis. Moderasi beragama hadir sebagai solusi dalam menjembatani perbedaan tersebut melalui penanaman nilai toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Moderasi beragama tidak hanya berkontribusi pada aspek ideologis dengan menjaga keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dan Pancasila, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dengan menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, moderasi beragama turut berperan dalam menjaga ketahanan keamanan dengan mencegah berkembangnya radikalisme, ekstremisme, serta konflik berbasis agama.

Namun demikian, implementasi moderasi beragama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti radikalisasi berbasis digital, rendahnya literasi keagamaan moderat di kalangan generasi muda, serta politisasi agama dalam kontestasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat persatuan, serta meningkatkan daya tahan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Jika diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, moderasi beragama akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Jihad, F. M. (2019). *Ketahanan Umat Beragama Dalam Mencegah*

Radikalisme di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. JURNAL KETAHANAN NASIONAL.

Junaedi, E. (2019). *INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG. HARMONI.*

M. Amirul Mukhlisin Al Hariri, M. A. (2024). *MODERASI BERAGAMA: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL. Salimiya.*

Mohammady, Z. A. (2017). *Organisasi, Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Budaya. Muslim Heritage.*

Muhammad Nikobul Lubab, M. A. (2025). *Moderasi Beragama sebagai Prinsip Pendidikan Islam Multikultural dalam Pemikiran Azyumardi Azra.*

Nurlaili, F. C. (2024). *Moderasi Beragamadi Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. Journal of Religious Harmony.*

Pratam, M. .. (2024). *Moderasi Beragama: Upaya Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraspektif Al-Qur'an .*

Purbajati, H. I. (2020). *Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah . FALASIFA Jrnal Studi Keislaman.*

Sulton. (2023). *Moderasi Beragama:
Konsep dan Penerapannya di
Indonesia. PERSPEKTIF.*